

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PUSAKO TINGGI YANG DIJUAL
BERDASARKAN HIBAH MAMAK KEPALA WARIS DI KENAGARIAN
LUBUK BASUNG JORONG III SANGKIR
(Studi Putusan No. 42/Pdt.G/2021/PN LBB)**

JURNAL



Oleh:

Nama : Rahmad Handanul
Npm : 191000274201150
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI**

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PUSAKO TINGGI YANG DIJUAL
BERDASARKAN HIBAH MAMAK KEPALA WARIS DI KENAGARIAN
LUBUK BASUNG JORONG III SANGKIR
(Studi Putusan No. 42/Pdt.G/2021/PN LBB)**

JURNAL



Oleh:

Nama : Rahmad Handanul
Npm : 191000274201150
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI**

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

**Penyelesaian Sengketa Tanah Pusako Tinggi Yang Dijual Berdasarkan Hibah
Mamak Kepala Waris Di Kenagarian Lubuk Basung Jorong III Sangkir
(Studi Putusan No. 42/Pdt.G/2021/PN LBB)**

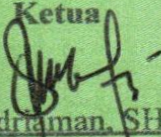
Oleh

Nama : Rahmad Handanul
NIM : 191000274201150
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

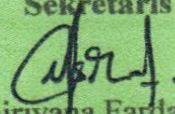
Jurnal ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji *Ujian Komprehensif*
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Pada Tanggal (15
Februari 2025) dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

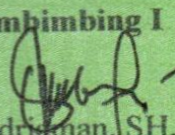
Ketua


Mahlil Adriansan, SH., MH
NIDN. 102101804

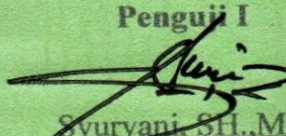
Sekretaris


Nessa Fajriyana Farda, SH., MH
NIDN. 1006018801

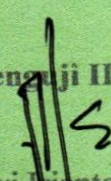
Pembimbing I


Mahlil Adriansan, SH., MH
NIDN. 102101804

Penguji I


Svuryani, SH., MH
NIDN. 1015096501

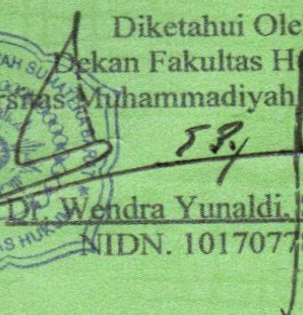
Penguji II


Kartika Dewi Nianto, SH., MH
NIDN. 1005018601

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat


Dr. Wendra Yunaldi, SH., MH
NIDN. 1017077801



LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL

**Penyelesaian Sengketa Tanah Pusako Tinggi Yang Dijual Berdasarkan Hibah
Mamak Kepala Waris Di Kenagarian Lubuk Basung Jorong III Sangkir
(Studi Putusan No. 42/Pdt.G/2021/PN LBB)**

Oleh


Nama	: Rahmad Handanul
NIM	: 191000274201150
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Telah disetujui Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi

(19 Februari 2025)

Pembimbing I



Mahlil Adriaman, SH., MH

NIDN. 102101804

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN JURNAL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Rahmad Handanul**
NIM : **191000274201150**
Judul Jurnal : **Penyelesaian Sengketa Tanah Pusako Tinggi Yang Dijual Berdasarkan Hibah Mamak Kepala Waris Di Kenagarian Lubuk Basung Jorong III Sangkir (Studi Putusan No. 42/Pdt.G/2021/PN LBB)**

Menyatakan bahwa Jurnal ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun *plagiasi* (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila Jurnal ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau *plagiasi* (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 20 Syaban 1446 H
19 Februari 2025 M

Yang Menyatakan



Rahmad Handanul
NIM. 191000274201150

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PUSAKO TINGGI YANG DIJUAL BERDASARKAN HIBAH MAMAK KEPALA WARIS DI KENAGARIAN LUBUK BASUNG JORONG III SANGKIR (Studi Putusan No. 42/Pdt.G/2021/PN LBB)

Rahmad Handanul

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email: rahmadhandanul1997@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penyelesaian Sengketa tanah Pusako Tinggi Di Sumatera Barat Khususnya Di Jorong III Sangkir Nagari Lubuk Basung antara Kaum Suku Caniago Payung Dt Majo Kando dengan Mamak Kepala Waris yang dijual berdasarkan Hibah Mamak Kepala Waris (Studi Putusan No. 42/Pdt.G/2021/PN LBB). Harta pusako tinggi di Minangkabau merupakan harta diperoleh dari nenek moyang/leluhur yang dimanfaatkan oleh suatu kaum secara turun temurun secara garis keturunan Matrilineal dan dikelola oleh seorang mamak kepala waris, mamak kepala waris adalah nama jabatan dalam suatu kaum yang bertugas memimpin seluruh anggota kaum dan mengurus, mengatur mengawasi serta bertanggung jawab atas hal-hal pusako kaum. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normative, data yang dijadikan sebagai sumber analisis adalah data primer, sekunder serta tersier sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan buku, hukum adat, yurisprudensi dan Studi Putusan. Hasil penelitian ini berupa cara penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi secara Litigasi mengajukan gugatan ke pengadilan.

Kata Kunci: Penyelesaian sengketa; Harato pusako; Mamak kepala waris

Abstract

This research aims to find out how the Pusako Tinggi land dispute was resolved in West Sumatra, especially in Jorong III Sangkir Nagari Lubuk Basung between the Caniago Payung Dt Majo Kando tribe and the Waris Head Mamak who were sold based on the Waris Head Mamak Grant (Decision Study No. 42/Pdt. G/2021/PN LBB). Pusako high property in Minangkabau is property obtained from ancestors/ancestors which is utilized by a people from generation to generation along the Matrilineal lineage and is managed by a mamak chief heir. , organizes, supervises and is responsible for community heritage matters. This research is qualitative with a normative juridical type of research, the data used as a source of analysis is primary, secondary and tertiary data so that the approach used is the book approach, customary law, jurisprudence and decision studies. The results of this research are a method of resolving Pusako Tinggi land disputes through litigation by filing a court lawsuit.

Keywords: Dispute resolution; Harato pusako; The heir's mother

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan budaya dan adat termasuk dalam hal pewarisan karena adat merupakan pencerminan dari pada kepribadian suatu bangsa dan merupakan salah satu penjelmaan yang dapat menunjukkan identitas dirinya kepada bangsa.¹ Salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia ialah Minangkabau yang merupakan salah satu

Wignodipoero Soerojo, "Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat", Jakarta : PT Haji Masagung, 1987, hlm 3.



suku bangsa yang menganut sistem matrilineal. Secara sederhana kata Matrilineal dapat kita artikan sebagai struktur masyarakat yang diatur menurut garis keturunan Ibu.² Sistem kekerabatan matrilineal termasuk dalam sistem kekerabatan yang bersifat “unilineal” atau “unilateral”, yaitu suatu sistem yang dalam menghitung keturunan hanya mengakui satu pihak orang tua saja sebagai penghubung keturunan. Dalam hal ini hanya memakai “ibu”.

Di Sumatera Barat dikenal suatu atau etnik nusantara yang biasa disebut dengan Minangkabau. Orang Minangkabau atau Minang adalah kumpulan etnik nusantara yang berbahasa serta menjunjung adat Minangkabau. Wilayah penganut kebudayaannya meliputi Sumatera barat, separuh Riau, Sebagian utara Bengkulu, Bagian barat Jambi, bagian selatan Sumatera Utara, barat daya Aceh, dan Negeri Sembilan di Malaysia. Kebudayaan Minangkabau adalah bersifat keibuan (Matrilineal), dengan harta dan tanah diwariskan dari ibu kepada anak perempuan, sementara itu urusan agama dan politik merupakan bagian dari urusan kaum laki-laki (walapun ada setengah dari perempuan turut memainkan peran ini).³

Masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal seperti Minangkabau, warisan diturunkan kepada kemenakan, baik warisan gelar maupun warisan harta, yang biasanya disebut sako dan pusako (gelar dan harta). Sebagai warisan, harta yang ditinggalkan pewaris tidak boleh dibagi-bagi oleh yang berhak. Setiap harta pusaka selalu dijaga keutuhannya, demi untuk menjaga keutuhan kaum kerabat, sebagaimana yang diajarkan falsafat alam dan hukum adat mereka.⁴

Petitih mengatakan bahwa sako (gelar) dan pusako (harta) diwariskan kepada kemenakan. Dari niniak ke mamak, dari mamak ke kemenakan (dari nenek (moyang) ke paman, dari paman ke keponakan). Pengertian dari nenek (moyang), sudah tentu berdasarkan sistem kekerabatan matrilineal.⁵ Pengertian turun dari nenek ke mamak, dari mamak ke kemenakan ialah turunya hak warisan dari sako dan pusako. Sako adalah warisan jabatan sedangkan pusako merupakan warisan harta benda.⁶

Harato pusako dalam terminology Minangkabau disebut *harato jo pusako*. *Harato* adalah sesuatu milik kaum yang tampak dan wujud secara material seperti sawah, ladang, rumah gadang, ternak, dan sebagainya. *Pusako* adalah sesuatu milik kaum yang diwarisi secara turun temurun baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Oleh karena itu di Minangkabau dikenal pula dua kata kembar yang artinya sangat jauh berada yaitu sako dan pusako.⁷

Dalam Minangkabau, harato pusako tinggi adalah harta pusaka yang diwariskan secara turun temurun melalui garis keturunan ibu. terdapat beberapa jenis harato pusako di Minangkabau salah satunya adalah tanah, Kata tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu atas permukaan

² Dt, Malaka Nan Putiah, H. Julius . Matrilineal dan Kekerabatan dalam Adat Minangkabau, Jakarta: forum Komunikasi Pemangku Adat dan Budayawan Gebu Minang, 9 oktober 2004, hlm. 2.

³ Ulfa ChaeraniNuriz, dkk, "Penerapan Hukum Adat Minangkabau Dalam Pembagian Warisan Atas Tanah (Studi di Suku Chaniago Di Jorong Ketinggian Kenagarian guguk VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, Ibu Kota Sarilamak), *Diponegoro Law Journal*, Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017, hlm. 1.

⁴ A.A. Navis, *Alam Takambang Jadi Guru*, Jakarta, Pustaka Grafitipers, 1984, hlm. 159

⁵ Ibid, hlm. 160

⁶ Ibid, hlm. 161

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, Hlm.



bumi yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang kali lebar yang diatur oleh hukum tanah. Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang dengan hak yang disediakan Volume 1 No. 1, Januari 2023 227 oleh UUPA (selanjutnya disebut UUPA) adalah untuk digunakan dan dimanfaatkan. Dalam Hukum Kebiasaan Inggris, pengertian tanah adalah permukaan bumi, bebatuan yang berada di bawah tanah atau di atas permukaan, di dalamnya termasuk tumbuhan dan bangunan yang ada di atasnya.⁸

Salah satu keistimewaan dan yang menjadi kekuatan adat Minangkabau adalah karena adanya harta pusako tinggi dan diakuinya tanah ulayat sebagai salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kesatuan suku atau kaum dalam kekerabatan matrilineal yang mengikat satu sama lainnya. Bagi masyarakat Minangkabau harta pusako tinggi atau tanah ulayat merupakan marwah dalam suku atau kaumnya, ada pusako tinggi dan tanah ulayat berarti ada suku atau kaum, karena adanya suku atau kaum dalam kekerabatan matrilineal adalah dengan adanya.⁹

1. *Rumah Gadang* (rumah gadang tempat berhimpunnya kaum atau saudara sesuku)
2. *Sasok jarami* (sawah atau ladang tempat menghidupi keluarga atau kaum)
3. *Pandam pakuburan* (tanah perkuburan kaum atau suku)
4. *Lantak sapadan* (batas-batas kebun dan hutan ulayat untuk pengembangan usaha)

Permasalahan tentang pengelolaan harta pusako tinggi merupakan persoalan yang sering terjadi dalam masyarakat adat di Minangkabau. Terutama mengenai hal ulayat, tanah ulayat masyarakat adat. Hal tersebut berupa hak guna, penguasaan tanah, konflik hak milik, perebutan tanah ulayat, maupun sengketa peralihan.

Terdapat dua macam harato pusako di Minangkabau, yaitu harato pusako randah dan harato pusako tinggi. Yang dimaksud harato pusako tinggi adalah segala harta pusako yang diwarisi secara turun temurun. Selama ini penyebutan tentang harta di Minangkabau sering tertuju penafsirannya kepada harta yang berupa materiil saja seperti sawah, ladang, tabek (kolam ikan), rumah gadang, bukit, hutan yang diwariskan secara turun temurun kepada anak/kemenakan perempuan, balai (tempat berkumpul), masjid atau langgar (surau), tanah pemakaman dinikmati pemakaiannya oleh seluruh anggota kaum.¹⁰

Harta pusako rendah adalah harta hasil pencaharian suami istri dalam suatu perkawinan dan apabila perkawinan tersebut terhenti karena perceraian atau karena meninggal salah satu pihak maka harta yang didapat selama perkawinan dalam masyarakat adat di Minangkabau dibagi dua, apabila yang meninggal suami maka setengah menjadi hak kemanakan dalam kaumnya, apabila yang meninggal istri maka setengah menjadi hak ibu atau saudara perempuannya dan sisa setengah menjadi hak istri/suami dan anaknya.

Harta pewarisan yang pada awalnya adalah merupakan harta pusako rendah akan menjadi harta pusako tinggi bila telah diwariskan berdasarkan sistem matrilineal. Dalam perkembangan di masyarakat Minangkabau, gadai dapat terjadi diluar empat syarat adat yang

⁸ Mahlil Adriaman, Rinny Syafitri, Syuryani, "PENYELESAIAN SENGKETA PENDAFTARAN TANAH ULAYAT DI KANTOR ATN/BPN, Jurnal Sakato Law Journal, Volume 1 No. 1 Januari 2023, Hlm. 226.

⁹ Rio Tutri, "Tinjauan Aspek Sosial Dalam rencana Pembangunan Jalan Dan Terowongan Balingka-Ngarai Sianok", *Jurnal ipteks Terapan Research Of Applied Science And Education*, Volume 10, Nomor 4 Tahun 2016, Hlm. 247

¹⁰ Kikky Febriasi, "Perkembangan Syarat Menggadai Tanah Harta Pusako Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau Di Kabupaten Agam Nagari Kamang Mudiak, *Premise Law Jurnal*, 2015, Hlm. 3



telah ditetapkan dan yang menjadi syarat mutlak untuk terlaksananya gadai adalah kata sepakat dengan ahli waris yang bersangkutan dengan pusaka tersebut.¹¹

Harta pusako tinggi di Minangkabau dikelola oleh seorang mamak kepala waris, mamak kepala waris adalah nama jabatan dalam suatu kaum yang bertugas memimpin seluruh anggota kaum dan mengurus, mengatur mengawasi serta bertanggung jawab atas hal-hal pusako kaum, dalam dinamikanya masyarakat hukum adat tidak dapat terlepas dari berbagai perubahan yang terjadi, baik yang berasal dari internal maupun eksternal masyarakat itu sendiri.

Pada putusan No 42/Pdt.G/2021/PN LBB terdapat sebuah kasus dimana seorang mamak kepala waris didalam suatu kaum tepatnya kaum/ suku Chaniago di Lubuk Basuang, mensertifikatkan tanah pusako tinggi nya dengan nomor sertifikat hak milik No 2496 Tanggal 01/05/2012 No. 00096/Lubuk Basung/2012 dengan luas 300m2, atas nama Syafri St. Pamuncak selaku Mamak Kepala Waris suku Caniago DT. Majo Kando , yang kemudian dihibahkan kepada Elisman Rasyid Dt. Majo Kando. Namun setelah dihibahkan kepada Elisman Rasyid Dt Majo Kando, harta pusaka ini kemudian dijual kepada Yefrianto dengan akta jual beli D.1208 tanggal 11/05/2021 di notaris Dedi Vetriawan SH, Mkn. Harta pusaka ini dijual tanpa adanya sepengetahuan daripada anggota kaum yang lain, hal ini tentu sangat bertentangan dengan hukum adat Minangkabau dimana harta pusaka tinggi ini tidak boleh dijual. Namun di dalam adat Minangkabau terdapat pengecualian dimana harta pusako tinggi ini boleh digadaikan, seperti:¹²

1. *Gadiah gadang indak balaki*, artinya untuk mengkawinkan perempuan yang sudah cukup dewasa yang kalau tidak dikawinkan dapat membuat malu kaumnya atau kepala suku.
2. *Mayik tabujua di ateh rumah* artinya, tanah pusaka dapat digadaikan apabila untuk digunakan sebagai biaya pemakaman.
3. *Rumah gadang katirisan* artinya, apabila rumah kaum (rumah gadang) perlu di renovasi/ perbaiki.
4. *Mambangkik batang tarandam* artinya, untuk menegakkan kepala penghulu karena penghulu sebelumnya telah meninggal.

Selain daripada keempat alasan tersebut harta pusaka tinggi ini tidak boleh digadaikan apalagi sampai dijual. Namun mamak kepala waris suku Chaniago di Lubuk Basung tersebut tidak menggadaikan namun menjual harato pusako tinggi kaumnya tanpa sepengetahuan kaumnya yang lain, hal ini tentu bertentangan dengan Adat Minangkabau yang sudah di pergunakan sejak zaman dahulu.

يُطَوَّقُهُ فَإِنَّهُ ظُلْمًا الْأَرْضِ مِنْ شَيْبَرًا أَخَذَ مَنْ « يَقُولُ - و سلم ع ل يه الله صلى - النَّبِيُّ سَمِعْتُ قَالَ رَبِّي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَرْضِينَ سَنَعٍ مِنْ الْقِيَامَةِ يَوْمَ

“Barangsiapa yang mengambil sejengkal tanah dengan dzalim maka pada hari Kiamat tanah tersebut akan dikalungkan padanya sebanyak tujuh lapis. (HR: Bukhari Muslim).¹³

¹¹ Idrus Hamkimy Dt. Rajo Penghulu, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 129

¹² *Ibid*, Hlm. 2

¹³ Admin Hidcom, Larangan Berbuat Dzalim dan Merampas Tanah Orang <https://hidayatullah.com/kajian/hadits-harian/2016/05/12/94669/larangan-berbuat-dzalim-dan-merampas-tanah-orang.html>, diakses pada Minggu, tanggal 26 November 2023, pukul 18.11 WIB

Dalam Kasus ini lelaki yang lebih muda didalam Kaum bernama SYAHRIL diangkat berdasarkan kesepakatan Kaum sebagai mamak kepala waris yang baru selaku Penggugat mewakili anggota kaum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor perkara 42/Pdt.G/2023/PN LBB.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative yakni menganalisa dengan merujuk kepada studi kepustakaan dan penggunaan sumber data hukum guna menopang kajian ini. Secara khusus, mencari asas atau teoori yang berhubungan dalam menjawab permasalahan atau isu hukum yang dituju.¹⁴ Pada dasarnya penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek internal dalam hukum positif.hal ini berpandangan bahwa hukum merupakan lembaga yang otonom dan tidak mempunyai hubungan dengan lembaga sosial lainnya.¹⁵Serta Putusan Perkara No. 42/Pdt.G/2021/ Pn.Lbb. lebih jauh sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer. Sekunder, tersier. Serta, mengumpulkan data dilakukan berdasarkan studi kepustakaan yang dikaitkan dengan isu hukum yang akan diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Pusako Tinggi yang Dijual Oleh Mamak Kepala Waris yang Terjadi di Kenagarian Lubuak Basuang Jorong III Sangkir Berdasarkan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/Pn.Lbb.

Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Kaum Datuak Majo Kando Suku Caniago Nagari Lubuk Basung terkait tanah Pusako Tinggi yang disertipikat oleh mamak kepala waris atas nama pribadi dan dihibahkan ke Datuak Majo Kando dan dijual kepada orang lain melalui Gugatan Di Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang diwakili oleh Mamak Kepala Waris yang diangkat oleh kesepakatan Kaum. didalam Perkara Nomor 42/Pdt.G/2021/PN.Lbb yang penulis temukan pada Putusan tersebut Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima N.O (niet onvankelijveerklrad).

Putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh majelis hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan pada sidang terbuka untuk umum, berdasarkan Pasal 178 HIR/189 RBG berbunyi dalam rapat permusyawaratan karena jabatannya hakim harus menambahkan dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.

Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli¹⁶. Dalam suatu putusan, pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari

¹⁴ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 24.

¹⁵ Mahlil Adriaman dkk, *Metode Penulisan Artikel Hukum*, Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, Agam Sumatera Barat, 2024, Hlm. 87.

¹⁶ R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm 146

Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan hukum tersebut dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian tentang:¹⁷

- a. Apakah alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat formil dan materil.
- b. Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian.
- c. Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti.
- d. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.

Pertimbangan hakim dalam mengambil Putusan Pengadilan tingkat pertama hakim melihat pada Eksepsi Tergugat I mengenai kedudukan Penggugat selaku mamak kepala waris atau *diskualifikasi in person* tentang syarat formil gugatan pengajuan gugatan menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut lebih tepat dipertimbangkan pada bagian eksepsi. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1598k/Sip/1975 tanggal 24 Agustus 1977 yang kaidah hukumnya berbunyi “Menurut Hukum Adat Minangkabau Mamak kepala Waris dalam suatu kaum adalah lelaki tertua dalam kaumnya tetapi apabila ternyata laki-laki yang tertua tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai Mamak Kepala Waris maka lelaki yang lebih muda dapat diangkat sebagai mamak kepala waris dengan persetujuan seluruh anggota kaum”. Pada pertimbangan majelis hakim selanjutnya oleh karena pada kenyataannya mamak kepala waris terdahulu masih hidup dan masih hadir dalam persidangan maka kedudukan penggugat pada mamak kepala waris dalam hal ini haruslah dibuktikan dengan adanya persetujuan anggota kaum. Untuk membuktikan adanya kesepakatan kaum, Penggugat mengajukan bukti berupa surat pernyataan kesepakatan kaum. Dalam pertimbangannya majelis hakim berpendapat sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3901k/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang terdapat kaedah bahwa “Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian) sehingga dengan demikian surat tersebut haruslah dikesampingkan”. Selanjutnya dalam pertimbangan majelis hakim, sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 2961k/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 yang menyatakan “Menurut hukum acara, orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata adalah hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan, apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan sesuatu sengketa maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum dan harus lah dinyatakan cacat *error in person*”. Selanjutnya dalam putusan Mahkamah Agung No. 1720k/Sip/1975 tanggal 22 Juni 1975 menurut hukum adat Minangkabau terhadap harta pusaka tinggi kaum yang tidak diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaumnya maka gugatan tersebut tidak dapat diterima. Maka atas pertimbangan tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat eksepsi para Tergugat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima.

¹⁷ Nurlen Afriza, Tahap-Tahap Dalam Membuat Putusan, <https://pa-padang.go.id/tahap-tahap-dalam-membuat-putusan/>, diakses pada Hari Sabtu 17 Februari 2024, Pukul 1.23 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Kemudian dengan adanya ketidakpuasan dari Penggugat terhadap Putusan tersebut, maka Penggugat mengajukan upaya hukum banding ke tingkat Pengadilan Tinggi. Pertimbangan hakim dalam mengambil Putusan pada tingkat Pengadilan Tinggi bahwa menurut Hukum Adat Minangkabau bahwa setiap anggota kaum mempunyai hak untuk mempertahankan hak ulayat nya yang mana dalam rangka mempertahankan hak tersebut tidak tertutup kemungkinan dilakukan karena merugikan anggota kaumnya sendiri. Bahwa apabila yang melakukan perbuatan yang merugikan anggota kaum adalah anggota dari kaum tersebut maka tidak di isyaratkan gugatan harus diajukan oleh Mamak Kepala Waris. Menimbang bahwa Penggugat dengan para Tergugat adalah berasal dari satu kaum maka sekalipun Penggugat bukan sebagai Mamak Kepala Waris akan tetapi Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan sebagai salah seorang anggota kaum untuk kepentingan kaumnya, disamping itu tidak ada satu buktipun yang menunjukkan bahwa Para Tergugat lebih tua dari Penggugat maka eksepsi para Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang mengadili sendiri dalam putusannya mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Jadi dalam Penyelesaian dalam dua sampel diatas, hakim memberikan pertimbangan yang berbeda bahwasannya harta pusaka tinggi kaum merupakan hak dari seluruh anggota kaum, untuk perbuatan hukum peralihan harta pusaka tinggi suatu kaum kepada pihak lain dapat dilakukan dengan syarat harus adanya kesepakatan dari seluruh anggota kaum yang dikenal dalam Hukum Adat Minangkabau "*bulek indak basandiang, petak indak basagi* ". Jadi pada intinya, penyelesaian sengketa tanah pusaka tinggi, untuk memastikan kepastian hukum bagi kaum untuk mempertahankan harta pusaka tingginya dapat diajukan secara litigasi melalui jalur Pengadilan.

2. Status Tanah Pusako Tinggi Yang Dijual Berdasarkan Hibah Mamak Kepala Waris.

Dalam hukum adat, yang dimaksud dengan hibah adalah harta kekayaan seseorang yang dibagi-bagikannya diantara anak-anaknya pada waktu ia masih hidup. Penghibahan itu sering terjadi ketika anak-anak mulai berdiri sendiri atau ketika anak-anak mereka mulai menikah dan membentuk keluarga sendiri. Penghibahan itu dilakukan ketika si pemberi hibah itu masih hidup, dengan tujuan untuk menghindari percekocokan yang akan terjadi diantara anak-anaknya itu apabila ia telah meninggal dunia..¹⁸

Dalam Adat Minangkabau mamak kepala waris itu adalah laki-laki yang tertua dalam kaum dan turun temurun, Di dalam melaksanakan tugasnya mamak kepala waris itu harus bijaksana sesuai dengan alur dan patut. Begitupun perihal harta pusaka tinggi suatu kaum, seseorang mamak kepala waris tidak boleh melakukan Hibah terhadap harta pusaka tinggi tanpa adanya kesepakatan dari seluruh anggota kaum. Sebagaimana fungsi dari mamak kepala waris dalam hukum adat minangkabau, jika

¹⁸ Faizal Bafadhal, "Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum, Jambi, Juli 2003, hlm. 16.

harta yang akan dihibahkan berasal dari harta kaum, maka penghibah harus seizin anggota kaum.¹⁹

Harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau pada hakikatnya merupakan harta yang diperoleh suatu kaum secara turun temurun dari leluhurnya, dan dalam Adat Minangkabau harta ini tidaklah dapat dijual, namun dapat digadaikan, itupun dalam keadaan-keadaan tertentu saja. Dalam menggadaikan harta pusaka tinggi, haruslah mendapat persetujuan dari seluruh anggota kaum.

Pada putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/Pn. Lbb, penulis menemukan sebuah kasus yang mana seorang Mamak Kepala Waris mensertifikatkan lalu kemudian menghibahkan harta pusaka tinggi kepada Datuak Majo Kando (Datuak Suku Chaniago yang mana sarangi sapusako dengan Penggugat) yang mana kemudian menjual tanah pusaka tinggi kaumnya tersebut secara sepihak. Mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat-syarat sah perjanjian, yaitu adanya kecakapan para pihak, adanya kesepakatan, objek tertentu, dan sebab yang halal, dalam hak transaksi jual beli yang dilakukan oleh Datuak Majo Kando dalam Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/Pn.Lbb dengan pembeli tanah pusaka tinggi tersebut, tidaklah memenuhi syarat subjektif daripada Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sah perjanjian, dikarenakan adanya kecacatan dalam kesepakatan jual beli tersebut. Kesepakatan yang dimaksud disini ialah kesepakatan daripada seluruh anggota kaum yang tentu saja memiliki hak atas tanah pusaka tinggi tersebut, yang terjadi dalam transaksi tersebut hanyalah kesepakatan antara Datuak Majo Kando dengan pembeli, sedangkan status tanah yang diperjual belikan adalah Harta Pusako Tinggi.

KESIMPULAN

Penyelesaian Sengketa Harato Pusako Tinggi yang dijual berdasarkan Hibah di Jorong III Sangkir Lubuk Basung berupa penyelesaian secara litigasi, hal ini dibuktikan dengan Putusan Perkara No. 42/Pdt.G/2021/PN.Lbb. Yang mana dalam putusan tersebut Gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang amar putusan pada pokoknya tidak dapat diterima. Kemudian Penggugat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Padang Nomor 118/Pdt.G/2022/PT.Pdg. yang mana dalam amar putusannya mengadili sendiri mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. Kedudukan Mamak Kepala Waris dalam Adat Minangkabau mempunyai kewenangan untuk mengurus, mengatur, dan mengawasi serta bertanggung jawab atas harta pusaka tinggi kaum. Dalam konteks ini Mamak dalam kedudukannya sebagai Mamak Kepala Waris yang akan mengelola dan mengatur pengelolaan harta pusaka kaumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A.A. Navis, Alam Takambang Jadi Guru, Jakarta, Pustaka Grafitipers, 1984.

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo, 2021.

Yaswirman, Hukum Keluarga adat dan Islam, Analisis sejarah, Karakteristik dan prospeknya dalam Masyarakat Materinial Minangkabau, Andalas University Press Padang 2006. Hlm.169



Dt, Malaka Nan Putiah, H. Julius . Matrinial dan Kekerabatan dalam Adat Minangkabau, Jakarta: forum Komunikasi Pemangku Adat dan Budayawan Gebu Minang.9 oktober 2004.

Idrus Hamkimy Dt. Rajo Penghulu, Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau, Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2004.

Mahlil Adriaman dkk, Metode Penulisan Artikel Hukum, Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, Agam Sumatera Barat, 2024,

R Soeparmono, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, Mandar Maju, Bandung, 2005.

Wignjodipoero Soerojo, “Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat”, Jakarta : PT Haji Masagung,1987.

Zainuddin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

Harmita Shah, “Kedudukan Mamak Kepala Waris Dalam Harta Pusaka Tinggi (Studi Di Nagari Matur Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat”, Universitas Diponegoro Semarang, 2006,

Kikky Febriasi, “Perkembangan Syarat Menggadai Tanah Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau Di Kabupaten Agam Nagari Kamang Mudiak, Premise Law Jurnal, 2015.

Mahlil Adriaman, Rinny Syafitri, Syuryani, “PENYELESAIAN SENGKETA PENDAFTARAN TANAH ULAYAT DIKANTOR ATN/BPN, Jurnal Sakato Law Journal, Volume 1 No. 1 Januari 2023.

Rio Tutri, “Tinjauan Aspek Sosial Dalam rencana Pembangunan Jalan Dan Terowongan Balingka-Ngarai Sianok”, Jurnal ipteks Terapan Research Of Applied Science And Education, Volume 10, Nomor 4 Tahun 2016.

Ulfa ChaeraniNuriz, dkk,”Penerapan Hukum Adat Minangkabau Dalam Pembagian Warisan Atas Tanah(Studi di Suku Chaniago Di Jorong Ketinggian Kenagarian guguk VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, Ibu Kota Sarilamak), Diponegoro Law Journal, Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017.

Diluar Jurnal dan Buku

Admin Hidcom, Larangan Berbuat Dzalim dan Merampas Tanah Orang <https://hidayatullah.com/kajian/hadits-harian/2016/05/12/94669/larangan-berbuat-dzalim-dan-merampas-tanah-orang.html>, diakses pada Minggu, tanggal 26 November 2023, pukul 18.11 WIB

Nurlen Afriza, Tahap-Tahap Dalam Membuat Putusan, <https://pa-padang.go.id/tahap-tahap-dalam-membuat-putusan/>, diakses pada Hari Sabtu 17 Februari 2024, Pukul 1.23 WIB.



JURNAL KAJIAN ILMIAH
MULTIDISIPLINER

LETTER OF ACCEPTANCE **FOR SCIENTIFIC ARTICLES PUBLICATION**

No. 12/JKIM/LoA/2-VIII/2024

Chief of Editor Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner (JKIM) has decided that the name article below has been accepted on JKIM and will be published in Vol 8 No 2 2024.

Author : Rahmad Handanul¹, Mahlil Adriaman² -
Email : rahmadhandanul1997@gmail.com¹, mahliladriaman@gmail.com²
Title : **PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PUSAKO TINGGI YANG DIJUAL
BERDASARKAN HIBAH MAMAK KEPALA WARIS DI KENAGARIAN LUBUK
BASUNG JORONG III SANGKIR (STUDI PUTUSAN NO. 42/PDT.G/2021/PN
LBB)**
Affiliation : Universitas Muhammadiyah

Thank you for submitting your article to our journal. We wish you all possible success in the future.

Warm regards,



Jurnal Kajian Ilmiah
Multidisipliner
Chief Editor

DOAJ
DIRECTORY OF
OPEN ACCESS
JOURNALS

GARUDA
SARANA RUJUKAN DIGITAL

Google
Scholar

neliti
Jurnal Kajian Ilmiah

ISJDNeo

metaseo
oneSearch

S5
sinta
Indonesian Journal of Technology and Science



SURAT KEPUTUSAN

NOMOR: 128/KEP/II.3.AU/F/2023

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GANJIL T.A. 2022/2023

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

- Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **RAHMAD HANDANUL NPM : 19.10.002.74201.150**
- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
- b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
- c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/I.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/I.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar
13. SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.
14. SK Rektor No. 1436/KEP/II.3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.
15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2021/2022

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Menunjuk Saudara "**MAHLIL ADRIAMAN ,SH.MH**" sebagai Dosen Pembimbing I dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :
Nama/NPM : **RAHMAD HANDANUL /19.10.002.74201.150**
- Judul Skripsi : **PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PUSAKO TINGGI YANG DIJUAL OLEH MAMAK KEPALA WARIS (STUDI PUTUSAN NOMOR 42/PDT.G/2021/PN.LBB)**
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi
PADA TANGGAL : 12 Jumadil Akhir 1444 H
05 Januari 2023 M



- Tembusan:
1. Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan
 2. Kasubag Keuangan Fakultas Hukum
 3. Mahasiswa/i Yang bersangkutan
 4. Pertinggal

**KARTU KENDALI DAN
BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA	Rahmad Handanul	
NIM	19-150	
KONSENTRASI	Hukum Pidana/Hukum Perdata/Hukum Tata Negara	
DOSEN PEMBIMBING	1	Sebagai Pembimbing I
	2	Sebagai Pembimbing II

JUDUL SKRIPSI Penyelesaian Sengketa tanah pusako tinggi yg
di jual oleh mamak kepada waris

Mulai Bimbingan

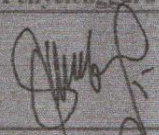
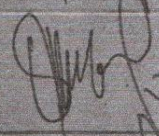
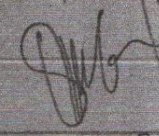
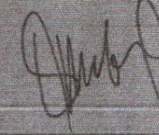

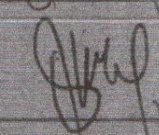
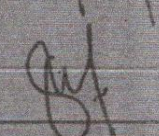
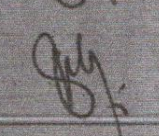
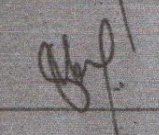
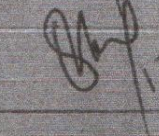
S/O

NO	Hari/Tanggal	Jam Bimbingan	Materi Bimbingan	Saran	Paraf Pmbb	Ket
1	18 November 2023	11.38	Sempro	Penambahan Hadist dan Referensi dari Dosen terkait administrasi	84	
2	16 Desember 2023	14.54	- " -		84	
3	19 Desember 2023	13.47	Sempro	ACC proposal	84	
4	12 Januari 2024	11.46	artikel	penambahan	84	
5	16 Januari 2024	11.11	artikel	penambahan	84	
6	19 Januari 2024	11.39	artikel	ACC Artikel	84	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Bukittinggi:

Mahasiswa

JADWAL KEHADIRAN
SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI

NO	Hari/Tanggal	Nama Peserta/ NIM	Judul Skripsi	Paraf Ketua Penyelenggara
1	Kamis 22 Des 22	Wahyu Seputra	Pertindungan Hukum Anak Perkawinan Campuran di Sumatera Barat	
2	Kamis 22 Des 22	Muhammad Hafidh	Keabsahan Perjanjian melalui Aplikasi Tiktok Cash Di tinjau dari Hukum Perjanjian di Indonesia	
3	Kamis 22 Des 22	Helmi Rizki Harahap	Pengelasan terhadap cwan- passer, pengguna Aplikasi apakah tanpa pembatalan ekoran apakah terhadap pengemudi (Driver) Go-Food	
4	Kamis 22 Des 22	Sari Wulan	Pengelasan sangketa kapeng urisan koperasi Petani 140 bersama (Studi putusan no. 507/pt.6/2021/Pn. the)	
5	Kamis 22 Des 22	Lina Anggraeni Sari	Tanggung Jawab Kesehatan dan keselamatan kerja (53) terhadap tenaga kerja di B2a kerja.	
6	Selasa 13 Feb 23	M. Faturrahman	Pertindungan hak peminan sosial tenaga kerja bagi pihak yang tidak menyelenggarakan jaminan sosial tenaga kerja	
7	Selasa 13 Feb 23	Normalisa Apriliana Adeyana	Analisis yuridis tanah waris yang belum di bagi pada putusan Pekerta no. 15/pt.6/2019/Pn. B2	
8	Selasa 13 Feb 23	Chita Sandra Amelia alfian	Dampak penambahan pengurusan perseroan terbatas perorangan seleksi UU no. 61/2023	
9	Selasa 13 Feb 23	Yazri Anwar	Posisi Pemis Iklan kemudian penjualan di bawah di prinsip penggunaan jawa's print pelatir penggunaan (studi kasus putusan no. 155/pt.6/2019/Pn. the)	
10	Selasa 13 Feb 23	Prati Gunawan	Kajian yuridis tentang eksibisisme menurut hukum pidana dan hukum kesetaraan	

Catatan: 5 menghadiri Seminar Proposal dan 5 menghadiri Ujian Komprehensif terbuka

Bukittinggi,
Mahasiswa